



PANITIA SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP II TAHUN 2010

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM *AD HOC* PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP II NOMOR: 08/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2010

Panitia Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 membuka kesempatan kepada putra/putri Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan **persyaratan** sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ;
12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi;
14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- b. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
- c. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- e. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
- f. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp.6000,00;
- g. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00;
- h. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00;
- i. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- j. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00;
- k. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
- l. Fotokopi KTP;
- m. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- n. Daftar Riwayat Hidup lengkap ;
- o. Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis / pada saat ujian lisan.

Catatan :

1. Peserta yang pernah mengikuti seleksi tahap pertama tetap melengkapi semua persyaratan yang baru seperti tersebut di atas (huruf a s/d o).
2. Seluruh persyaratan administrasi dimasukkan dalam amplop tertutup warna coklat polos diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dengan mencantumkan Kode dan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat.
 - Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama) : kode PN
 - Untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) : kode PTLamaran sudah diterima Panitia Seleksi Daerah paling lambat tanggal 5 Agustus 2010.
3. Pengumuman kelulusan administrasi dapat dilihat di Papan Pengumuman Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan pada website Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id, www.bawas.mahkamahagung.go.id, www.badilag.net, dan www.badilum.info pada tanggal 18 Agustus 2010.
4. Seleksi tertulis akan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2010 di setiap Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia, kecuali Peserta yang mendaftar dan lulus seleksi administrasi pada Pengadilan Tinggi yang jumlahnya dibawah 5 Peserta, akan diikuti sertakan pada Pengadilan Tinggi terdekat.
5. Ujian lisan dan Profile Assessment, waktu dan tempat penyelenggaraan akan ditentukan kemudian bersama pengumuman kelulusan ujian tertulis.

Jakarta, 5 Juli 2010

Panitia Seleksi